



RENJA

RENCANA KERJA

TAHUN 2026

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang.....	
II. Landasan Hukum.....	
III. Struktur Organisasi.....	
IV. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	
V. Visi dan Misi Renja	
BAB II HASIL EVALUASI CAPAIAN KINERJA RENJA TAHUN 2024	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
I. Strategi dan Arah Kebijakan	
II. Rencana Program/Kegiatan Tahun 2026	
BAB V PENUTUP	
Lampiran <i>Tabel Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027</i>	
Lampiran <i>Hasil Evaluasi Renja Tahun 2024</i>	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana kami telah dapat menyusun Laporan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Hal tersebut merupakan upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2021-2026, maka berdasarkan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi perlu menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023 dalam implementasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Hal ini merupakan bentuk pengukuran terhadap program/kegiatan yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun kedepan, yang mana acuan nanti akan berpedoman pada Pergub Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026, dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2021-2026. Guna memberikan gambaran sejauh mana rancangan Renja yang ingin dilaksanakan satu tahun kedepan.

Akhir kata Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Jambi,



MUZAKIR, M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19730302 200604 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi merupakan salah satu di antara beberapa dinas yang ada di Provinsi Jambi dan merupakan bagian Integral dari Pemerintah Provinsi Jambi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam menjalankan peran strategisnya, khususnya dalam pembangunan infrastruktur / sarana dan prasarana melalui :

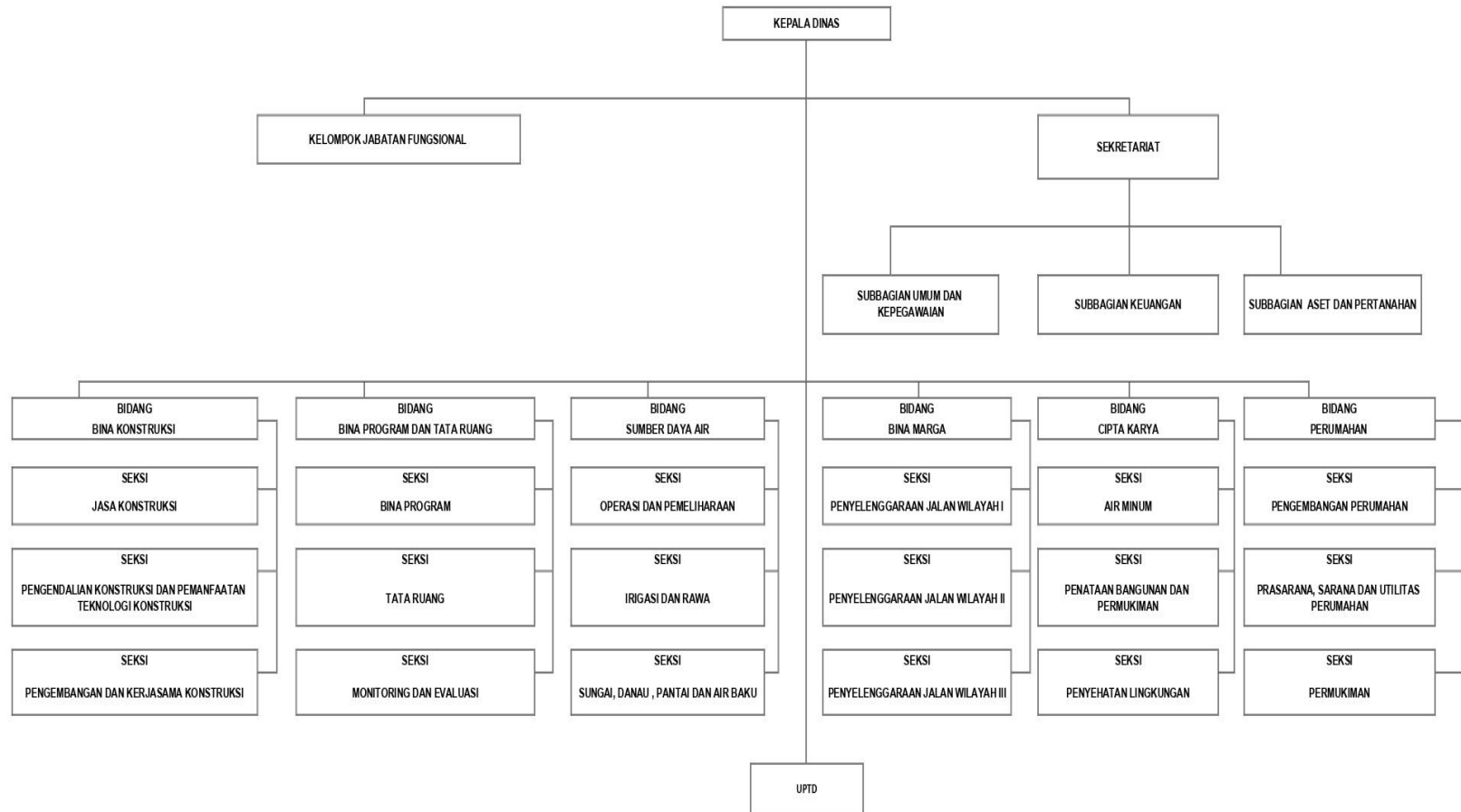
1. Bagian Sekretariat
2. Bidang Sumber Daya Air (SDA)
3. Bidang Bina Marga
4. Bidang Cipta Karya
5. Bidang Perumahan Rakyat
6. Bidang Bina Program dan Tata Ruang
7. Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian
8. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
9. UPTD Workshop dan Peralatan

B. Landasan Hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Propinsi Jambi. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi masih bernama Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) Provinsi Jambi merupakan Hasil pengintegrasian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Provinsi

Jambi, yang organisasinya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja dinas – dinas Provinsi Jambi. Pembentukan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Perda No.2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi,

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi



C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Uraian Tupoksi Dinas Daerah Provinsi Jambi. Dimana pada Bab II Bagian Pertama Pasal 2, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memiliki tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut :

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Dina Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dengan **Fungsinya:**

- 1) Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Jambi sesuai dengan bidang tugasnya.

Dimana penyelenggaraan Tupoksinya tersebut OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Jambi memiliki struktur organisasi sebagai media pelaksana (Tim Leader) dalam melaksanakan tugas tersebut, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- Tugas** :
- a) Melaksanakan ketentuan sebagaimana tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum
 - b) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan sekretariat, bidang , UPTD dan kelompok jabatan fungsional

2. Sekretariat

Tugas : Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan dibidang kesekretariatan serta pelayanan teknis dan administrative sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a) pengkoordinasi kegiatan dinas ;
- b) pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi dinas;
- c) penataan organisasi dan tata laksana;
- d) pengkoordinasi dan penyusunan peraturan perundang - undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/ jasa;
- f) penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- g) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah provinsi;
- h) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- i) penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;

- j) penyelesaian tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota wilayah provinsi;
- k) pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bina Program dan Tata Ruang

- Tugas** : Membantu Bidang Bina Program dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan penyusunan program dan perumusan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- Fungsi** :
- a. pengkoordinasi dan penyusunan rencana program serta anggaran dinas;
 - b. penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi;
 - c. penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten/ kota;
 - d. pembinaan kepada kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan penataan ruang;
 - e. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan bidang penataan ruang;
 - f. penyelenggaraan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
 - g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat;

- h. pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang provinsi;
- i. pengkoordinasi penyelenggaraan penataan ruang provinsi;
- j. pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4). Bidang Sumber Daya Air (SDA)

Tugas : Membantu Dinas dalam rangka membantu bidang melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang sumber daya air serta pelayanan teknis dan administrative guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a) pelayanan kebijakan daerah mengenai pengelolaan sumber daya air meliputi irigasi, rawa, pantai, sungai, danau, waduk dan bendungan, termasuk penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah;
- b) penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai;
- c) penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/ kota;
- d) penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- e) pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan

sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;

- f) pengembangan dan penelitian tentang pengelolaan sda dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota
- g) pelayanan kebijakan daerah tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan provinsi dan irigasi lintas daerah kabupaten/ kota;
- h) penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan sda dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skun der untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan provinsi dan irigasi lintas daerah kabupaten/ kota;
- i) penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sda dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan provinsi dan irigasi lintas daerah kabupaten/ kota;
- j) pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;
- k) pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan, konservasi dan pemeliharaan serta evaluasi dibidang sumber daya air;
- l) pengembangan sistem pembiayaan dibidang sumber daya air;
- m) pelaksanaan fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelola dibidang sumber daya air;

- n) pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air baik pada irigasi, rawa, sungai danau pantai dan air baku; dan
- o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5). Bidang Bina Marga

- Tugas** : Membantu Dinas Dalam Rangka Melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan di bidang bina marga serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi** :
- a) pelayanan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;
 - b) penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;
 - d) pengembangan dan penelitian mengenai penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;
 - e) perumusan program dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;
 - f) perumusan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
 - g) pengkoordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;

- h) perumusan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- i) pengendalian pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- j) pengendalian pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- k) pengendalian pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian - bagian jalan;
- l) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan, pengujian;
- m) pengendalian penyusunan rencana teknis dan program kegiatan di bidang bina marga dalam wilayah provinsi jambi ;
- n) pengendalian penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- o) pelaksanaan dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga bidang bina marga; dan
- p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6). Bidang Cipta Karya

Tugas : Membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang cipta

karya serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi** :
- a) penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi;
 - b) penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
 - c) penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota;
 - d) fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung lingkup sektoral;
 - e) pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten / kota yang menjadi kewenangan provinsi;
 - f) pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang menjadi kewenangan provinsi;
 - g) pengendalian, pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan provinsi;
 - h) penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan provinsi;

- i) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan provinsi;
- j) penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan dan penelitian untuk mendukung sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan provinsi;
- k) pembinaan dan penyusunan program tata bangunan dan lingkungan;
- l) pengelolaan dan pengendalian sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman (PLP); dan
- m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7). Bidang Perumahan

Tugas : Membantu Dinas dalam rangka Melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang perumahan serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a) Merumuskan program dan kegiatan bidang Perumahan Rakyat.
- b) pembinaan SDM bidang perumahan lintas kab/ kota dan atau yang menjadi kewenangan provinsi;
- c) pengembangan pusat informasi bidang perumahan tingkat provinsi;

- d) pengendalian penyiapan NSPM bidang perumahan yang menjadi kewenangan provinsi;
- e) penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
- f) pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi;
- g) penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah 15 ha;
- h) penyelenggaraan PSU permukiman;
- i) pemberian sertifikasi dan registrasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
- j) perumusan kebijakan dan strategi provinsi dalam melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengendalian teknis perumahan formal;
- k) pengkoordinasian untuk fasilitasi dan perumusan kebijakan Provinsi dalam pembiayaan perumahan MBR;
- l) perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang pendataan, pembangunan, kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaku pem bangunan perumahan swadaya ; dan
- m) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

8). UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi

Tugas : Melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dalam bidang pelayanan jasa Pengujian mutu air, mekanisme tanah, geologi dan bahan Bangunan.

Fungsi :

- a) Penyusunan Program Kerja kegiatan kelaboratoriuman dengan mengacu pada kebijakan mutu laboratorium.
- b) Penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana laboratorium
- c) Pelayanan jasa pengujian
- d) Pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pengujian
- e) Pengkoordinasian kegiatan kaji ulang manajemen laboratorium
- f) Pembinaan terhadap pengelolaan peralatan laboratorium.
- g) Pembinaan terhadap pengelolaan SDM laboratorium
- h) Pelaksanaan kebijaksanaan yang berkaitan dengan jaminan mutu dan peningkatan profesionalisme laboratorium
- i) Pengoordinasian pelaksanaan operasional pengujian.

9). Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian

Tugas : Membantu Dinas dalam rangka Melaksanakan rencana penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan dibidang bina konstruksi dan pengendalian serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a) pelayanan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- b) pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah provinsi;
- c) penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;
- d) pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi;
- e) pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah provinsi;
- f) peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah provinsi;
- g) pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi;
- h) pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha;

- i) pembinaan teknis, pengendalian mutu pekerjaan dan penelitian dibidang pekerjaan umum dalam wilayah provinsi;
- j) penyelenggaraan bimbingan teknis, dan peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia lingkup dinas;
- k) penerapan norma standar prosedur dan metode konstruksi lingkup dinas;
- l) pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup dinas; dan
- m) pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

10). UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan

Tugas : Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang diberikan Dinas PUPR dalam bidang pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengoperasian, pelayanan jasa, pengelolaan perbekalan dan logistik alat-alat berat dan alat-alat pendukung serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, program dan urusan rumah tangga balai.

Fungsi :
a) Penyusunan program kerja balai
b) Pemberian pelayanan administrasi, kepegawaian, keuangan, program dan urusan rumah tangga balai

- c) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengoperasian alat-alat berat dan alat-alat pendukung.
- d) Pelaksanaan pemberian pelayanan jasa alat-alat berat dan alat-alat pendukung.
- e) Pelaksanaan pengelolaan logistik meliputi penyimpanan, pengamanan dan pendistribusian untuk penunjang operasional alat-alat berat dan alat-alat pendukung.
- f) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan provinsi terkait dengan penggunaan alat-alat berat dan alat-alat pendukung dengan cara swakelola.
- g) Pelaksanaan pengelolaan perbekalan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Visi dan Misi Renja 2026

Pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2030 memuat Visi “Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT” dengan beberapa misi sebagai berikut:

- 1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
- 2. Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata**, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan

pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.

- 3. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Renstra Perangkat Daerah memiliki peran untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut diatas dengan mempedomani sasaran-sasaran RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sasaran-sasaran yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital**

Birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi digital, serta jujur dan bertanggung jawab dengan hasil kinerja yang terukur. Hal ini ditandai dengan peningkatan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, peningkatan indeks integritas nasional Provinsi Jambi, Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan indeks pelayanan publik.

b. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah

Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah Penyediaan Infrastruktur yang handal pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah dalam pemenuhannya, sehingga sebagai salah satu upaya melaksanakan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran dalam RPJMD . Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah rasio konektivitas, persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap, akses terhadap air minum layak, konsumsi listrik per kapita dan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi.

c. Meningkatkan kualitas lingkungan

Dengan mengusung pembangunan yang rendah karbon di Provinsi Jambi, maka pembangunan yang dilakukan akan diupayakan menggunakan praktek-praktek baik, sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga bahkan ditingkatkan. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin meningkat dan emisi Gas Rumah Kaca yang semakin menurun.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN 2024

CAPAIAN KINERJA 2024 Berawal dari Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2024 yang tergambar dalam Rencana Penetapan Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024, berikut dapat dirincikan capaian indikator utama Renja Tahun 2024 sebagaimana berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	82,243%	74,70%	90,83
2	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pengelolaan sumber daya air	Persentase meningkatnya indeks kondisi sistem irigasi kewenangan Provinsi	Persen	64,51%	62,49%	96,87
		Persentase pengurangan kawasan banjir dan penanganan daya rusak air di WS kewenangan Provinsi	persen	1,88%	0,00%	0
3	Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Pengurangan luas kawasan permukiman kumuh	Ha	2,3	1,25	54,35
4	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan gedung strategis daerah Provinsi	Penyediaan dan peningkatan bangunan gedung strategis daerah Provinsi yang layak fungsi	Unit	5	3	60

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7
5	Terpenuhinya akses air minum layak	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	persen	83,92%	80,02%	95,35
6	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja konstruksi	Rasio tenaga konstruksi yang kompeten	persen	54,00%	40,00%	74,07
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	91,6%	91,7%	100
8	Meningkatnya Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	persen	BB	BB	BB

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Renja merupakan fokus kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam setiap sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran merupakan rumusan pengejawantahan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome dan impact program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Seiring dengan berkembangnya pembangunan daerah yang semakin pesat, penyediaan kapasitas pelayanan di bidang infrastruktur sudah seharusnya diikuti dengan pengimplementasian kualitas dan kapasitas infrastruktur dan SDM yang terkini dan terdepan. Sebagai bentuk komitmen Provinsi Jambi dalam meningkatkan pengelolaan layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi menjadi garda terdepan dalam terselenggaranya pelayanan di bidang ke Pu-an. Hal ini sejalan dengan semua kompleksitas isu terkini yang diperbaharui dengan data real-time yang lengkap, cepat tersampaikan pada masyarakat luas, dan memiliki informasi yang jelas atau sah. Dalam hal ini, peran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi menjadi sangat penting sesuai dengan amanat dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan jalan, irigasi, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman,

bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

BAB IV

STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan tindakan yang komprehensif yang berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan yang berkaitan dengan optimalisasi sumberdaya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Provinsi Jambi yang terkait dengan tugas dan fungsi serta tujuan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, meliputi:

- a. Meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah serta pengembangan gerakan pemberantasan korupsi;
- c. Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi;
- d. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government
- e. Fasilitasi dan peningkatan kualitas prasarana transportasidarat;
- f. Meningkatkan sarana prasarana air minum perdesaan dan perkotaan;
- g. Percepatan peningkatan kualitas jalan provinsi;
- h. Meningkatkan penyediaan air baku dan air layak minum;
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman dan perumahan yang layak;
- j. Meningkatkan kualitas dan kelestarian sungai;

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi dalam 5 (lima) tahun kedepan sudah dapat memberikan pedoman mengenai strategi dan arah kebijakan yang perlu dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam 5 (lima) tahun kedepan. Strategi dan arah kebijakan tersebut, diuraikan melalui tabel berikut ini:

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra DPUPR Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Optimalisasi peningkatan pemanfaatan sumberdaya peningkatan jalan provinsi dan efektifitas semua untuk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Updating</i> berkala data VCR jalan kewenangan provinsi; • Merumuskan rencana prioritas pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi berdasarkan karakteristik kondisi dan kebutuhan konektivitas jangka panjang; • Pembangunan konektivitas baru; • peningkatan kualitas kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan dan peningkatan penggunaan aplikasi untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan jalan; • Peningkatan kesiapan readiness criteria untuk penyelenggaraan melalui sumber pembiayaan APBN; • Penegasan pembagian tugas Bidang Bina Marga dengan • Peningkatan kinerja UPTD Workshop dan Peralatan dalam menjaga kualitas jalan terhadap penurunan kondisi; • peremajaan peralatan pendukung penanganan jalan dan jembatan termasuk untuk cepat tanggap perbaikan jalan dan jembatan. • Fasilitasi dan penyiapan readiness criteria pembangunan Jembatan Sungai Rambut.
		Peningkatan efektivitas penyelenggaraan jaringan irigasi kewenangan , penanggulangan daya	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeksi berkala terhadap kinerja jaringan irigasi kewenangan provinsi;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		rusak air, dan Pembangunan sistem pengendali banjir di WS Pengabuan, Kab.Tanjung Jabung Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan data dan informasi potensi daya rusak air di WS kewenangan provinsi; • Pematangan design bangunan pengendali banjir di WS Pengabuan • Peningkatan peran pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi kawasan permukiman kumuh; • Merehabilitasi dan merelokasi rumah korban bencana alam • Membangun dan mengembangkan sistem prasarana permukiman di Kawasan Strategis Provinsi. • Peningkatan kualitas konstruksi dan arsitektural bangunan gedung strategis provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dokumen rencana penanganan kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi; • Rahabilitasi rumah tidak layak huni; • Pemantapan pembagian kewenangan sistem drainase sekunder di Kota Jambi, Muara Bungo, dan Sungai Penuh. • Penyiapan rencana teknis, kelembagaan dan pembangunan sistem prasarana regional • Merehabilitasi Bangunan dan Lingkungan Kawasan pemerintahan olahraga dan pariwisata
		Peningkatan sinkronisasi pengembangan SPAM daerah kabupaten/kota berbatasan di Sungai Penuh-Kerinci dan Perkotaan Jambi	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan rencana dan peningkatan kualitas dokumen rencana pengembangan SPAM perpipaan daerah kabupaten/kota berbatasan • Pembangunan SPAM Regional di Sungai Penuh-Kerinci
		Meningkatkan peran Bidang Bina Kontruksi dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyelenggaraan kegiatan pelatihan tenaga kerja konstruksi Provinsi Jambi; • Sosialisasi dan koordinasi dengan asosiasi tenaga jasa konstruksi untuk peningkatan keikutsertaan peserta pelatihan.
		Pemenuhan penetapan Produk Hukum Rencana Tata Ruang dan peningkatan koordinasi lintas pemangku kepentingan, dan sosialisasi regulasi tata ruang.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembinaan penyiapan RTRW dan RDTR di kabupaten/kota; • Penyiapan perangkat hukum turunan operasionalisasi pengendalian pemanfaatan ruang;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan peran dan kinerja Forum Penataan Ruang Daerah.• Meningkatkan kualitas media informasi sosialisasi tata ruang;
		Penyiapan proses pengadaan tanah sebelum Pembangunan bagi kepentingan umum	<ul style="list-style-type: none">• Inventarisasi rencana pembangunan infrastruktur yang membutuhkan tanah;• Penyiapan proses perencanaan pengadaan tanah untuk fasilitas bagi kepentingan umum.
		Peningkatan efektifitas kerja dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan tugas dan fungsi	<ul style="list-style-type: none">• peningkatan sumber daya aparatur yang berintegritas, kompeten, adaptif, dan kolaboratif

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2026

Adapun total Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 berdasarkan Indikator Kinerja, Kelompok dan Sasaran, Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif dan Sumber Dana sebagaimana pada lembar lampiran.

.....Tabel.....

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026

Dan Perkiraan Maju Tahun 2027

PENUTUP

Penyusunan Laporan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi ini merupakan upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Serta acuan yang berdasarkan pada Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang urusan wajib yang menjadi kewenangan Provinsi.

Melalui rancangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan laporan baik itu laporan pelaksana program kegiatan tahun berjalan maupun acuan akuntabilitas kinerja untuk satu tahun kedepan.

Demikian kami sampaikan rancangan ini, kritik dan saran yang bersifat membangun akan kami terima, dan kami ucapkan terima kasih.

RENCANA KERJA (RENJA) OPD TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			1.159.138.986.000		1.306.815.153.000	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.159.138.986.000		1.306.815.153.000	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1.105.107.986.000		1.242.784.153.000	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	71.906.006.000	BB Predikat	65.017.173.000	
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Di Keluarkan	8 Dok/Lap	3.095.611.000	8 Dok/Lap	3.733.608.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	985.700.000	3 Dokumen	1.112.398.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen	138.500.000	9 Dokumen	198.500.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9 Dokumen	238.789.000	9 Dokumen	235.789.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9 Dokumen	232.400.000	9 Dokumen	265.400.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9 Dokumen	186.790.000	9 Dokumen	240.989.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2 Laporan	325.752.000	2 Laporan	423.752.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	987.680.000	2 Laporan	1.256.780.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	44.585.000.000	12 Bulan	36.911.020.000	Sekretariat
1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/ Bulan	43.200.000.000	250 Orang/ Bulan	35.400.000.000	Sekretariat
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.235.000.000	1 Dokumen	1.385.720.000	Sekretariat
1	03	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	125.300.000	Sekretariat
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 Tahun	802.742.000	1 Tahun	825.742.000	Sekretariat
1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	338.207.000	2 Dokumen	350.207.000	Sekretariat
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	464.535.000	3 Laporan	475.535.000	Sekretariat

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
												Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2					3		4		7		8
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Terbinanya aparatur/ pegawai yang berkualitas/berkompetensi		35 Orang	1.610.400.000	35 Orang	1.751.000.000	Sekretariat
1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	235.600.000	1 Paket	250.600.000	Sekretariat
1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		30 Orang	1.374.800.000	30 Orang	1.500.400.000	Sekretariat
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		13 Laporan	4.032.793.000	13 Laporan	4.042.393.000	Sekretariat
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	273.028.000	4 Paket	273.028.000	Sekretariat
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	978.000.000	1 Paket	987.600.000	Sekretariat
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3 Dokumen	1.287.330.000	3 Dokumen	1.287.330.000	Sekretariat
1	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	225.983.000	1 Laporan	225.983.000	Sekretariat
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	8.572.000	1 Laporan	8.572.000	Sekretariat
1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	1.259.880.000	1 Dokumen	1.259.880.000	Sekretariat
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor		35 Unit	4.568.755.000	35 Unit	4.083.755.000	Sekretariat
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 Unit	2.500.000.000	2 Unit	1.500.000.000	Sekretariat
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		18 Paket	30.000.000	25 Paket	40.000.000	Sekretariat
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		35 Unit	1.500.000.000	35 Unit	2.005.000.000	Sekretariat
1	03	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		8 Unit	538.755.000	8 Unit	538.755.000	Sekretariat
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Jumlah Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Tahun	5.045.109.000	1 Tahun	4.939.000.000	Sekretariat
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	30.852.000	1 Laporan	55.300.000	Sekretariat
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	1.255.557.000	1 Laporan	1.500.000.000	Sekretariat
1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	258.700.000	1 Laporan	258.700.000	Sekretariat
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Laporan	3.500.000.000	2 Laporan	3.125.000.000	Sekretariat
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara		370 Unit	3.120.487.000	370 Unit	3.791.655.000	Sekretariat
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional		95 Unit	1.661.455.000	95 Unit	1.661.455.000	Sekretariat
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		95 Unit	307.032.000	95 Unit	585.200.000	Sekretariat
1	03	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung		5 Unit	1.152.000.000	5 Unit	1.545.000.000	Sekretariat

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	7	4	7	8
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	67,14%	219.016.980.000	67,14%	226.016.980.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya Indeks Kondisi sistem Irigasi Kewenangan provinsi.	2 Lokasi	128.316.980.000	2 Lokasi	138.316.980.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0005	Pembangunan Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun	1 Bendungan	0	1 Bendungan	0	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0019	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	1 Unit	2.500.000.000	1 Unit	2.500.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	0 Unit	0	0 Unit	0	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber	5 Lembaga	416.980.000	5 Lembaga	416.980.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0077	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0,1 KM	350.000.000	0,1 KM	350.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	2 Unit	3.000.000.000	2 Unit	3.000.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	10 KM	15.000.000.000	10 KM	20.000.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan	0,03 KM	600.000.000	0,03 KM	600.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0086	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	1 KM	3.500.000.000	1 KM	3.500.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai	Jumlah Dokumen Evaluasi dan	5 Dokumen	1.000.000.000	5 Dokumen	1.000.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0089	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang	5 Unit	10.000.000.000	5Unit	10.000.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber	5 Lembaga	1.000.000.000	5 Lembaga	1.000.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0092	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	4Unit	500.000.000	4Unit	500.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	1 KM	12.500.000.000	1 KM	12.500.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0097	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,8 KM	300.000.000	0,8 KM	300.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0098	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	1,75 KM	8.000.000.000	1,75 KM	8.000.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0099	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	0,5 KM	500.000.000	0,5 KM	500.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	1.500.000.000	5 Dokumen	1.500.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	8 Unit	1.500.000.000	8 Unit	1.500.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1 KM	500.000.000	1 KM	500.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0108	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,10 KM	350.000.000	0,10 KM	350.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0109	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	8 Unit	6.000.000.000	8 Unit	6.000.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	20 Titik	8.000.000.000	20 Titik	8.000.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	8 Dokumen	3.800.000.000	8 Dokumen	3.800.000.000	Sumber Daya Air

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	7	4	7	8
1	03	02	1.01	0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,50 KM	35.000.000.000	0,50 KM	40.000.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	5 Dokumen	500.000.000	5 Dokumen	500.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	6.000.000.000	1 Unit	6.000.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	5 Dokumen	2.000.000.000	5 Dokumen	2.000.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	10 Dokumen	4.000.000.000	10 Dokumen	4.000.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengurangan Kawasan Banjir dan Penanganan Daya Rusak Air di WS Kewenangan Provinsi	51,54%	90.700.000.000	51,54%	87.700.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2,75 KM	23.000.000.000	2,75 KM	25.000.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	1 Bendung	0	1 Bendung	0	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0,5 KM	5.000.000.000	0,5 KM	5.000.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2,5 KM	9.000.000.000	2,5 KM	10.000.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	0,2 KM	5.000.000.000	0,2 KM	5.000.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,5 KM	18.000.000.000	1,5 KM	15.000.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 Bendung	0	1 Bendung	0	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	1 KM	7.000.000.000	1 KM	7.000.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,8 KM	9.000.000.000	0,8 KM	8.000.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,7 KM	9.000.000.000	0,7 KM	7.000.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	13 Dokumen	3.800.000.000	13 Dokumen	3.800.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya	1 DI	50.000.000	1 DI	50.000.000	Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	0038	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi	1 Kawasan	300.000.000	1 Kawasan	300.000.000	Sumber Daya Air

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	7	4	7	8
1	03	02	1.02	0039	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Jumlah Daerah Irigasi Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan	1 DI	1.550.000.000	1 DI	1.550.000.000	Sumber Daya Air
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	85 Persen	21.000.000.000	85 Persen	31.000.000.000	Cipta Karya
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	85 %	21.000.000.000	85 %	31.000.000.000	Cipta Karya
1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2 Kabupaten/Kota	0	2 Kabupaten/Kota	0	Cipta Karya
1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	Cipta Karya
1	03	03	1.01	0016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	200 Orang	0	200 Orang	0	Cipta Karya
1	03	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	150 Liter/Detik	20.000.000.000	150 Liter/Detik	30.000.000.000	Cipta Karya
1	03	03	1.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	0 Unit	0	0 Unit	0	Cipta Karya
1	03	03	1.01	0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0 Kabupaten/Kota	0	0 Kabupaten/Kota	0	Cipta Karya
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana dan prasarana persampahan regional yang terbangun	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	Cipta Karya
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sarana dan prasarana persampahan regional yang terbangun	3 Dok/Lap	1.000.000.000	3 Dok/Lap	1.000.000.000	Cipta Karya
1	03	04	1.01	0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	2 Kabupaten/Kota	400.000.000	2 Kabupaten/Kota	400.000.000	Cipta Karya
1	03	04	1.01	0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	1 Ton/hari	0	1 Ton/hari	0	Cipta Karya
1	03	04	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	300 Orang	600.000.000	300 Orang	600.000.000	Cipta Karya
1	03	04	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	10 Dokumen	0	10 Dokumen	0	Cipta Karya

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1				2		3	4	7	4	7	8
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Persentase rumah tangga yg sudah memiliki akses terhadap sanitasi yang layak , Persentase rumah tangga yg sudah memiliki akses th sanitasi yang aman	60 Persen 85,27 Persen 34,54 Persen	13.900.000.000	60 Persen 85,27 Persen 34,54 Persen	15.900.000.000	Cipta Karya
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase rumah tangga yg sudah memiliki akses th sanitasi yang aman	34,54 Persen	13.900.000.000	34,54 Persen	15.900.000.000	Cipta Karya
1	03	05	1.01	0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	20 M ³ /Hari	9.000.000.000	20 M ³ /Hari	11.000.000.000	Cipta Karya
1	03	05	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	220 Orang	400.000.000	220 Orang	400.000.000	Cipta Karya
1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	14 Dokumen	3.000.000.000	14 Dokumen	3.000.000.000	Cipta Karya
1	03	05	1.01	0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2 kabupaten/kota	1.000.000.000	2 kabupaten/kota	1.000.000.000	Cipta Karya
1	03	05	1.01	0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara	2 Unit	500.000.000	2 Unit	500.000.000	Cipta Karya
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase luas kawasan banjir yang tertangani	40 Persen	59.500.000.000	40 Persen	76.500.000.000	Cipta Karya
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Tersedianya saluran drainase sebagai pengendali banjir	5 Unit	59.500.000.000	5 Unit	76.500.000.000	Cipta Karya
1	03	06	1.01	0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	15 Sistem Drainase Perkotaan	8.000.000.000	20 Sistem Drainase Perkotaan	10.000.000.000	Cipta Karya
1	03	06	1.01	0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	40 Sistem Drainase Perkotaan	15.000.000.000	40 Sistem Drainase Perkotaan	20.000.000.000	Cipta Karya
1	03	06	1.01	0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	25 Sistem Drainase Perkotaan	5.000.000.000	25 Sistem Drainase Perkotaan	5.000.000.000	Cipta Karya
1	03	06	1.01	0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	15 Unit	25.000.000.000	15 Unit	35.000.000.000	Cipta Karya
1	03	06	1.01	0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	5 Dokumen	5.000.000.000	5 Dokumen	5.000.000.000	Cipta Karya
1	03	06	1.01	0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	12 Dokumen	1.500.000.000	12 Dokumen	1.500.000.000	Cipta Karya
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-	7.500.000.000	-	5.000.000.000	Cipta Karya
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	-	-	7.500.000.000	-	5.000.000.000	Cipta Karya

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	7	4	7	8
1	03	07	1.01	0007	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	1000 M ³ /Hari	5.500.000.000	1000 M ³ /Hari	3.000.000.000	Cipta Karya
1	03	07	1.01	0033	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	1000 M ³ /Hari	2.000.000.000	1000 M ³ /Hari	2.000.000.000	Cipta Karya
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pembangunan bangunan dan gedung strategis provinsi Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada tahun berkenaan	37.50 Persen 4 Persen	39.800.000.000	37.50 Persen 4 Persen	26.800.000.000	Cipta Karya
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah pembangunan bangunan dan gedung strategis provinsi	8 Unit	39.800.000.000	8 Unit	26.800.000.000	Cipta Karya
1	03	08	1.01	0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan	200 Orang	2.000.000.000	200 Orang	2.000.000.000	Cipta Karya
1	03	08	1.01	0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	150 Rumah Negara	500.000.000	150 Rumah Negara	500.000.000	Cipta Karya
1	03	08	1.01	0014	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang	3 Bangunan Gedung Cagar Budaya	3.000.000.000	3 Bangunan Gedung Cagar Budaya	3.000.000.000	Cipta Karya
1	03	08	1.01	0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	15 Bangunan Gedung Negara	300.000.000	15 Bangunan Gedung Negara	300.000.000	Cipta Karya
1	03	08	1.01	0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	25 Bangunan Gedung	8.000.000.000	25 Bangunan Gedung	5.000.000.000	Cipta Karya
1	03	08	1.01	0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	50 Lisensi	1.000.000.000	50 Lisensi	1.000.000.000	Cipta Karya
1	03	08	1.01	0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan	15 Dokumen	25.000.000.000	15 Dokumen	15.000.000.000	Cipta Karya
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	30 %	34.500.000.000	30 %	29.500.000.000	Cipta Karya
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	2 Kawasan	34.500.000.000	2 Kawasan	29.500.000.000	Cipta Karya
1	03	09	1.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan	11 Kawasan	30.000.000.000	11 Kawasan	25.000.000.000	Cipta Karya
1	03	09	1.01	0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan	5 Dokumen	3.000.000.000	5 Dokumen	3.000.000.000	Cipta Karya
1	03	09	1.01	0011	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	5 Dokumen	1.000.000.000	5 Dokumen	1.000.000.000	Cipta Karya

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	7	4	7	8
1	03	09	1.01	0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 kabupaten/kota	500.000.000	1 kabupaten/kota	500.000.000	Cipta Karya
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	85,25%	618.300.000.000	85,25%	749.300.000.000	Bina Marga
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	85,25%	618.300.000.000	85,25%	749.300.000.000	Bina Marga
1	03	10	1.01	0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	1,032,844 KM	10.000.000.000	1,032,844 KM	20.000.000.000	Bina Marga
1	03	10	1.01	0025	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi		0		0	Bina Marga
1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Jembatan	15.200.000.000	30 Jembatan	3.200.000.000	Bina Marga
1	03	10	1.01	0027	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	287 Jembatan	4.550.000.000	287 Jembatan	2.550.000.000	Bina Marga
1	03	10	1.01	0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	4 KM	550.000.000	4 KM	550.000.000	Bina Marga
1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10 KM	150.000.000.000	20 KM	200.000.000.000	Bina Marga
1	03	10	1.01	0032	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	5 Jembatan	30.000.000.000	5 Jembatan	100.000.000.000	Bina Marga
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	35 KM	50.000.000.000	400 KM	75.000.000.000	Bina Marga
1	03	10	1.01	0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	5 KM	20.000.000.000	3KM	8.000.000.000	Bina Marga
1	03	10	1.01	0036	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	3 Jembatan	10.000.000.000	3 Jembatan	8.000.000.000	Bina Marga
1	03	10	1.01	0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	6 KM	17.000.000.000	6 KM	10.000.000.000	Bina Marga
1	03	10	1.01	0039	Pembangunan Flyover	Jumlah Flyover yang Dibangun	1	150.000.000.000	1	100.000.000.000	Bina Marga
1	03	10	1.01	0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	8 KM	40.000.000.000	8 KM	90.000.000.000	Bina Marga
1	03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan,	13 Dokumen	19.000.000.000	13 Dokumen	19.000.000.000	Bina Marga
1	03	10	1.01	0042	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	10 KM	85.000.000.000	20 KM	100.000.000.000	Bina Marga
1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2 KM	7.000.000.000	2 KM	3.000.000.000	Bina Marga
1	03	10	1.01	0044	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	10 Dokumen	10.000.000.000	10 Dokumen	10.000.000.000	Bina Marga
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	54 Persen	10.235.000.000	54 Persen	11.850.000.000	Bina Konstruksi
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang di sertifikasi	120 Orang	5.835.000.000	120 Orang	6.850.000.000	Bina Konstruksi
1	03	11	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Orang	170.000.000	1 Orang	170.000.000	Bina Konstruksi
1	03	11	1.01	0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	75 Dokumen	1.500.000.000	75 Dokumen	1.730.000.000	Bina Konstruksi
1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	120 Orang	1.850.000.000	120 Orang	2.230.000.000	Bina Konstruksi
1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	75 Lembaga	865.000.000	75 Lembaga	1.270.000.000	Bina Konstruksi

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	7	4	7	8
1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	40 Orang	750.000.000	40 Orang	750.000.000	Bina Konstruksi
1	03	11	1.01	0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnannya	1 Orang	150.000.000	1 Orang	150.000.000	Bina Konstruksi
1	03	11	1.01	0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	3 Lembaga	550.000.000	3 Lembaga	550.000.000	Bina Konstruksi
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	3 Dokumen	2.300.000.000	3 Dokumen	2.400.000.000	Bina Konstruksi
1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	550.000.000	1 Layanan Informasi	650.000.000	Bina Konstruksi
1	03	11	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	250.000.000	1 Perangkat Pendukung	250.000.000	Bina Konstruksi
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	Bina Konstruksi
1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	250 Orang	1.000.000.000	250 Orang	1.000.000.000	Bina Konstruksi
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	2 Dokumen	2.100.000.000	2 Dokumen	2.600.000.000	Bina Konstruksi
1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	5 Paket Pekerjaan	1.000.000.000	5 Paket Pekerjaan	1.000.000.000	Bina Konstruksi
1	03	11	1.03	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan	5 Bangunan Konstruksi	100.000.000	5 Bangunan Konstruksi	100.000.000	Bina Konstruksi
1	03	11	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	3 Dokumen	1.000.000.000	3 Dokumen	1.500.000.000	Bina Konstruksi
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan penataan ruang, Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	10 Persen	8.450.000.000	10 Persen	4.900.000.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Revisi RTRW Provinsi Jambi	5 Dok/Lap	1.800.000.000	5 Dok/Lap	1.450.000.000	Bina Program dan
1	03	12	1.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.01	0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi	0 Dokumen	850.000.000	0 Dokumen	500.000.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.01	0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	300 Orang	700.000.000	300 Orang	700.000.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	4 Dok/Lap	1.350.000.000	4 Dok/Lap	1.050.000.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.02	0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	400.000.000	Bina Program dan Tataruang

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	7	4	7	8
1	03	12	1.02	0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.02	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	0 Dokumen	350.000.000	0 Dokumen	150.000.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	4 Dok/Lap	1.900.000.000	4 Dok/Lap	800.000.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	1.500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	300.000.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	4 Dok/Lap	3.400.000.000	4 Dok/Lap	1.600.000.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penvidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penvidik	1 Kasus	2.500.000.000	1 Kasus	700.000.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.04	0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1 Kasus	300.000.000	1 Kasus	300.000.000	Bina Program dan Tataruang
1	03	12	1.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal	Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	300.000.000	1 Berita Acara	300.000.000	Bina Program dan Tataruang
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			54.031.000.000		64.031.000.000	Perumahan
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni	100 Persen 100 Persen	4.160.000.000	100 Persen 100 Persen	4.160.000.000	Perumahan
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Data Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	5 Dok/Lap	650.000.000	5 Dok/Lap	650.000.000	Perumahan
1	04	02	1.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	Perumahan
1	04	02	1.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	Perumahan
1	04	02	1.01	0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	Perumahan
1	04	02	1.01	0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dokumen	275.000.000	2 Dokumen	275.000.000	Perumahan
1	04	02	1.01	0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	Perumahan
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Terselenggaranya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100 Persen	900.000.000	100 Persen	900.000.000	Perumahan
1	04	02	1.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan	Jumlah Orang/Sukarelawan yang	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	Perumahan

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	7	4	7	8
1	04	02	1.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	Perumahan
1	04	02	1.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	Perumahan
1	04	02	1.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	1 orang	150.000.000	1 orang	150.000.000	Perumahan
1	04	02	1.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	Perumahan
1	04	02	1.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	Perumahan
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase tersedianya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100 Persen	2.610.000.000	100 Persen	2.610.000.000	Perumahan
1	04	02	1.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	49 Unit Rumah	1.000.000.000	49 Unit Rumah	1.000.000.000	Perumahan
1	04	02	1.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	28 Unit Rumah	1.120.000.000	28 Unit Rumah	1.120.000.000	Perumahan
1	04	02	1.03	0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	5 Unit Rumah	0	5 Unit Rumah	0	Perumahan
1	04	02	1.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	15 Unit Rumah	490.000.000	15 Unit Rumah	490.000.000	Perumahan
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penurunan jumlah kawasan permukiman kumuh	100 Persen	23.325.000.000	100 Persen	28.325.000.000	Perumahan
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Tertata Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	100 Persen	10.625.000.000	100 Persen	15.625.000.000	Perumahan
1	04	03	1.01	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Perumahan
1	04	03	1.01	0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina	2 Kelompok Masyarakat	150.000.000	2 Kelompok Masyarakat	150.000.000	Perumahan
1	04	03	1.01	0016	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program	Jumlah Rumah Tangga Terdampak	20 Rumah Tangga	10.000.000.000	20 Rumah Tangga	15.000.000.000	Perumahan
1	04	03	1.01	0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	Perumahan
1	04	03	1.01	0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Orang	75.000.000	1 Orang	75.000.000	Perumahan
1	04	03	1.01	0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi	1 Rumah Tangga	200.000.000	1 Rumah Tangga	200.000.000	Perumahan
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	60,71 Persen	12.700.000.000	60,71 Persen	12.700.000.000	Perumahan

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	7	4	7	8
1	04	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	Perumahan
1	04	03	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	550 Unit Rumah	11.000.000.000	550 Unit Rumah	11.000.000.000	Perumahan
1	04	03	1.02	0004	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	40 Dokumen	400.000.000	40 Dokumen	400.000.000	Perumahan
1	04	03	1.02	0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	10 Hektar	1.200.000.000	10 Hektar	1.200.000.000	Perumahan
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Tersedianya Lingkungan Layak Huni Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Bagi Masyarakat	18 Persen	26.546.000.000	18 Persen	31.546.000.000	Perumahan
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah PSU Permukiman yang di Selenggarakan	52 Unit	26.546.000.000	52 Unit	31.546.000.000	Perumahan
1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	10 Dokumen	1.346.000.000	10 Dokumen	1.346.000.000	Perumahan
1	04	05	1.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi	95 Lokasi	25.000.000.000	95 Lokasi	30.000.000.000	Perumahan
1	04	05	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	Perumahan

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab		
												Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)			
1					2					3		4		7		8		
					UPTD workshop dan Peralatan								42.255.269.000		43.574.978.000	UPTD workshop dan Peralatan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								42.255.269.000		43.574.978.000	UPTD workshop dan Peralatan		
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								42.255.269.000		43.574.978.000	UPTD workshop dan Peralatan		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								16.364.399.000		16.364.399.000	UPTD workshop dan Peralatan		
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Predikat AKIP Perangkat Daerah			12 Bulan	2.136.421.000	12 Bulan	2.136.421.000	UPTD workshop dan Peralatan	
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	2.136.421.000	1 Dokumen	2.136.421.000	UPTD workshop dan Peralatan	
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah			3 Laporan	4.255.223.000	3 Laporan	4.255.223.000	UPTD workshop dan Peralatan	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	51.726.000	1 Paket	51.726.000	UPTD workshop dan Peralatan	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	3.787.954.000	1 Paket	3.787.954.000	UPTD workshop dan Peralatan	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	58.793.000	1 Paket	58.793.000	UPTD workshop dan Peralatan	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			150 Laporan	356.750.000	150 Laporan	356.750.000	UPTD workshop dan Peralatan	
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor			35 Unit	4.931.000.000	35 Unit	4.931.000.000	UPTD workshop dan Peralatan	
1	03	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			2 Unit	3.431.000.000	2 Unit	3.431.000.000	UPTD workshop dan Peralatan	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 Unit	1.500.000.000	3 Unit	1.500.000.000	UPTD workshop dan Peralatan	
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Jumlah Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1 Tahun	1.094.535.000	1 Tahun	1.094.535.000	UPTD workshop dan Peralatan	
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	9.317.000	1 Laporan	9.317.000	UPTD workshop dan Peralatan	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	154.695.000	1 Laporan	154.695.000	UPTD workshop dan Peralatan	
1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			29 Laporan	930.523.000	29 Laporan	930.523.000	UPTD workshop dan Peralatan	

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Bidang dan UPTD Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1				2		3	4	7	4	7	8
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	54 unit	3.947.220.000	54 unit	3.947.220.000	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	3.529.494.000	54 Unit	3.529.494.000	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	54 Unit	417.726.000	54 Unit	417.726.000	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	85,325 Persen	25.890.870.000	85,325 Persen	27.210.579.000	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	85,325 %	25.890.870.000	85,325 %	27.210.579.000	UPTD workshop dan Peralatan
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	400 KM	25.890.870.000	400 KM	27.210.579.000	UPTD workshop dan Peralatan
					UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi			5.555.000.000		5.255.000.000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.555.000.000		5.255.000.000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			5.555.000.000		5.255.000.000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP Perangkat Daerah		5.555.000.000		5.255.000.000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terbinanya aparatur/ pegawai yang berkualitas/berkompetensi	50 Orang	650.000.000	50 Orang	550.000.000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	650.000.000	50 Orang	550.000.000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	13 Laporan	305.000.000	13 Laporan	305.000.000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	90.000.000	45 Paket	90.000.000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	125.000.000	1 Paket	125.000.000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	7 Unit	2.000.000.000	7 Unit	1.800.000.000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	2.000.000.000	7 Unit	1.800.000.000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	7 Unit	2.600.000.000	7 Unit	2.600.000.000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	2.600.000.000	7 Unit	2.600.000.000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
J U M L A H								1.206.949.255.000		1.355.645.131.000	

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI
PERIODE PELAKSANAAN : 2024**

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trivulnan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)				
								I		II		III		IV		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya kualitas jalan Provinsi	01.03.10	PROGRAM PENYELenggaraAN JALAN PROvINSI	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	85,25	3.113.277.054.000	81,21	82.243	486.562.734.945	9,36	60.624.887.126	20,97	171.781.181.972	39,7	93.051.542.968	74,7	140.267.835.079	74,7	465.725.447.145	90,83	95,72	155,91	465.725.447.145	182,89	14,96	
		1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Wilayah I	85,25	3.113.277.054.000	81,21	85,325	486.562.734.945	73,49	60.624.887.126	74,7	171.781.181.972	39,7	93.051.542.968	74,7	140.267.835.079	74,7	465.725.447.145	87,55	95,72	155,91	465.725.447.145	182,89	14,96	
				Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Wilayah II	85,25		81,21	85,325		73,49		74,7				74,7		74,7		87,55		155,91		182,89		
				Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Wilayah III	85,25		81,21	85,325		73,49		74,7				74,7		74,7		87,55		155,91		182,89		
		1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang penyelenggaraannya diawasi	Km	74	371.340.000.000	11	5.684.171.122		109.808.780	2	1.384.292.952	7	1.178.538.625		2.366.436.006	9	5.039.076.363	81,82	88,65	20	5.039.076.363	27,03	1,36	
		1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara secara Rutin	Jembatan	146	16.850.000.000	130	982.422.000		53.083.548		95.115.200		42.000.000	130	104.937.300	130	295.136.048	100	30,04	156	295.136.048	106,85	1,75	
		1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan			0			0																	
		1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi	Km	123	990.789.000.000	32,2	404.142.114.063	2	60.143.202.306	6	151.970.391.470		75.429.728.858	22,75	91.463.957.754	22,75	379.007.280.388	108,33	93,78	54,95	379.007.280.388	44,67	38,25	
		1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	1.063	453.250.000.000	355	3.448.900.000								11.587.125.918		11.587.125.918		335,97	355	11.587.125.918	33,4	2,56	
		1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Km	3.618	287.500.000.000	112	20.014.300.000	112	105.681.748	258	7.049.669.524	525	7.265.838.600	756	4.350.803.100	756	18.771.993.372	100	93,79	868	18.771.993.372	23,99	6,53	
		1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km	104	401.900.000.000	5,2	22.597.120.760	8,5	79.627.148		7.258.713.274	4,5	3.598.867.417	8,6	23.187.910.133	8,6	34.125.117.972	101,18	151,02	13,8	34.125.117.972	13,27	8,49	
		1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	Km	90	575.000.000.000	13,1	24.306.707.000	0,25	66.014.748	0,25	3.044.184.324	0,25	5.483.396.552	0,25	3.523.660.448	1	12.117.256.072	100	49,85	14,1	12.117.256.072	15,67	2,11	
		1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0																	
		1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	0	0	0	0																	
		1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Km	4	7.948.054.000	3	4.987.000.000	0,5	67.468.848	0,5	859.717.528	1	53.172.916	2	3.405.110.720	4	4.385.470.012	100	87,94	7	4.385.470.012	70	55,18	
		1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen	11	8.700.000.000	1	400.000.000				119.097.300				1	277.893.700	1	396.991.000	100	99,25	1	396.991.000	9,09	4,56
2	Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengurangan Kawasan Banjir dan Penanganan Daya Rusak Air di WS Kewenangan Provinsi.	Persen	0	476.256.883.677	31,88	1.888	31.633.444.000	9,04	493.124.500	18,13	4.557.836.572	6,8	7.102.786.704	7,3	11.888.790.871	7,3	23.982.538.647	388,3	75,81	19,59	23.982.538.647	5,04	
				Persentase meningkatnya Indeks Kondisi sistem Irigasi Kewenangan Provinsi.	Persen	0		78,02	64,51	3,94	11,33	1,48				16,75	25,96	47,385								
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota berkenaan	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	Persentase	87,52	322.700.262.456	37,88	63,46	10.231.356.616	3,78	123.379.600	17,86	467.245.772	25	1.701.033.535	18,81	1.971.162.238	18,81	4.262.821.145	29,65	41,66	56,69	4.262.821.145	64,77	1,32
		1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	22	20.257.770.329	3	1.084.861.000	1	24.000.000	1	273.989.000	1	36.000.000	2	209.946.668	5	543.935.668	100	50,14	8	543.935.668	36,36	2,69	
		1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km	23	71.272.853.904	8,1	1.229.190.600	1	6.000.000	1			50.554.900		54.625.200	2	111.180.100	40	9,04	10,1	111.180.100	43,91	0,16	
		1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomendasi Pemantauan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang Disusun	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomendasi Pemantauan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	20	4.000.000.000	0	199.576.200		6.000.000	1	18.000.000	1	38.457.000	3	6.000.000	5	68.457.000	100	34,3	5	68.457.000	25	1,71	
		1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	20	8.651.746.717	2	1.084.860.772	1	10.500.000	1		1	258.722.800	2	172.500.000	5	441.722.800	100	40,72	7	441.722.800	35	5,11	
		1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	unit	14	6.191.626.708	3	199.734.172	0,5	12.000.000	1	135.211.900		24.280.000	1,5	20.460.000	3	191.951.900	100	96,1	6	191.951.900	42,86	3,1	
		1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	18	13.856.300.677	3	366.221.000	0,25	7.500.000	0,5			324.285.400	0,75	597.500.000	1,5	929.285.400	100	253,75	4,5	929.285.400	25	6,71	
		1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Persentase	0	0	0	0																	
		1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Km	1	182.743.685.903	0,46	0,25	2.209.536.800		39.379.600				43.922.400		18.000.000		101.302.000		4,58	0,46	101.302.000	46	0,86
		1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkuatan dan Pengaman Pantai			15.726.278.218			3.857.376.072		18.000.000		40.044.872		924.811.035		892.130.370		1.874.986.277		48,61		1.874.986.277		11,92	
		1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas baku daerah irigasi yang terair	Persentase	98	153.556.621.221	86,01	80,78	21.402.087.384	1,78	309.744.900	17,86	4.090.590.800	40	5.401.753.169	21,14	9.917.628.633	80,78	19.719.717.502	100	92,14	166,79	19.719.717.502	170,19	12,84
		1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Km	6	60.000.000.000	0	3.957.227.267		17.433.700	0,1	46.065.600	1	1.878.362.498	0,9	877.125.275	2	2.818.987.073	100	71,24	2	2.818.987.073	33,33	4,7	
		1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	Km	118	24.076.546.026	6	12.604.370.233		10.500.000	1,5		4,5	3.401.484.971	3	8.809.758.758	9	12.221.743.729	100	96,98	15	12.221.743.729	12,71	50,76	
		1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	359	21.586.532.942	80	1.767.860.912	4	31.500.000	20	1.631.429.800		47.335.700		31.500.000	24	1.741.765.500	30	98,52	104	1.741.765.500	28,97	8,07	
		1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	2.694	25.619.910.630	534	2.092.734.972	2	21.000.000	13,3	1.982.038.800		39.438.400	37,7	35.084.600	53	2.077.561.800	100	99,27	587	2.077.561.800	21,79	8,11	
		1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	103	22.273.631.623	15	979.894.000	2	229.311.200	3	431.056.600	2	35.131.600	13	164.160.000	20	859.659.400	100	87,73	35	859.659.400	33,98	3,86	
3	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas rumah layak huni	Hektar	16,79	1.050.000.000	11,4	100	684.625.915	1,99	13.610.000	75,69	514.793.571	22,32	65.800.000		78.935.049	100	673.138.620	100	98,32	111,4	673.138.620	663,49	64,11
		1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase	100	1.050.000.000	24,9925	100	684.625.915	1,99	13.610.000	75,69	514.793.571	22,32	65.800.000		78.935.049	25	673.138.620	25	98,32	49,9925	673.138.620	49,99	64,11

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)						
						7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana dan prasarana persampahan regional yang terbangun	100	47,5	95	2.525.213.000	13,57	16.224.600	27,14	761.062.661	54,3	1.333.656.549	95	390.324.190	95	2.501.268.000	100	99,05	71,25	2.501.268.000	71,25					
		1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sarana dan prasarana persampahan regional yang terbangun	1	1	1	2.525.213.000		16.224.600		761.062.661		1.333.656.549	1	390.324.190	1	2.501.268.000	100	99,05	2	2.501.268.000	200					
		1.03.04.1.01.0012	Facilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	0	0	0	0																				
		1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	20	9	7	2.525.213.000	1	16.224.600	2	761.062.661	4	1.333.656.549	7	390.324.190	14	2.501.268.000	200	99,05	23	2.501.268.000	115					
		01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	80	30	60	691.119.200	10	30.589.900	20	111.783.184	30	376.467.899	60	149.076.217	60	667.917.200	100	96,64	90	667.917.200	112,5	1,65				
		1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	80	120	60	691.119.200	20	30.589.900	40	111.783.184	50	376.467.899	60	149.076.217	170	667.917.200	283,33	96,64	290	667.917.200	362,5	1,65				
		1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	0	0	0																				
		1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	49	12	12	691.119.200	2	30.589.900	4	111.783.184	6	376.467.899	12	149.076.217	24	667.917.200	200	96,64	36	667.917.200	73,47	1,65				
		01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Kawasan Banjir yang Tertangani (Drainase)	36,51	35	36,5	2.250.302.800	7,3	68.315.800	30,95	503.653.232	12,8	58.006.189	36,5	93.808.379	36,5	723.783.600	100	32,16	71,5	723.783.600	195,84	0,65				
		1.03.6.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	36,51	36,51	36,51	2.250.302.800	9,13	68.315.800	12,17	503.653.232	18,26	58.006.189	36,51	93.808.379	36,51	723.783.600	100	32,16	36,51	723.783.600	100	0,65				
		1.03.06.1.01.0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang disediakan	0	0	0	0																				
		1.03.06.1.01.0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan				1.745.000.000		30.589.900		398.740.100		0		0		429.330.000		24,6		429.330.000	0,61					
		1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	43	11	10	41.350.000.000		505.302.800		37.725.900		3	104.913.132		5	58.006.189		10	93.808.379		20	294.453.600	72,09	0,71		
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKP Perangkat Daerah	85	72	70	261.549.490.564	72	225.219.000	70	43.520.929.490	72	5.320.985.748	72	854.098.550	72	17.305.500.919	28.660.438.764	72	52.141.023.981	102,86	119,81	144	52.366.242.981	169,41	20,02	
		1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	34.995.942.047	3	3.800.358.010	3	171.658.531	3	14.358.645.057	3	13.326.058.142	12	31.656.719.740	100	91,77	24	31.656.719.740	200	15,49				
		1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.400	270	280	33.250.020.047	280	3.451.823.123	280	280	14.209.104.998	280	12.824.639.043	280	30.485.567.164	100	91,69	550	30.485.567.164	39,29	15,79					
		1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	1	1	959.092.000	0,25	307.183.891	0,25	171.658.531	0,25	0,25	420.970.200	1	899.812.622	100	93,82	2	899.812.622	40	9,18					
		1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	1	286.830.000	0,25	41.350.996	0,25	0,25	149.540.059	0,25	80.448.899	1	271.339.954	100	94,0	2	271.339.954	40	18,26					
		1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1	1	1	3.347.325.000	0,25	225.219.000	0,25	1.249.669.108	0,25	176.765.079	0,25	127.378.002	0,25	539.392.889	0,25	12.335.941.031	1	13.179.477.001	100	1.054,64	2	13.404.696.001	200	400,46
		1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	2	1.410.278.000	0,5	225.219.000	0,5	993.151.108	0,5	152.271.579	0,5	0,5	461.484.453	1,5	12.923.011.063	75	1.301,21	3,5	13.148.230.063	35	932,31			
		1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	3	3	1.937.047.000	0,5	24.493.500	0,5	127.378.002	1	77.908.436	2	256.465.938	66,67	99,98	5	256.465.938	33,33	13,24						
		1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	1	20.530.159.000	0,25	296.153.246	0,25	212.626.240	0,25	1.807.692.465	1	1.993.235.220	1	4.309.707.171	100	101,75	2	4.309.707.171	200	20,99				
		1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	1	1	118.220.000	0,25	7.190.000	0,25	4.500.000	0,25	1.500.000	0,25	4.450.000	1	17.640.000	100	100	2	17.640.000	40	14,92				
		1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	1	1	5.676.777.000	0,25	229.369.402	0,25	190.206.224	0,25	395.442.699	0,25	510.915.112	1	1.325.933.437	100	109	2	1.325.933.437	40	23,36				
		1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	1	1	1.035.605.000	0,25	53.863.844	0,25	14.100.016	0,25	32.175.916	0,25	37.416.648	1	137.556.424	100	79,57	2	137.556.424	40	13,28				
		1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10	2	2	13.699.557.000	0,5	5.730.000	0,5	3.820.000	0,5	1.378.573.850	0,5	1.440.453.460	2	2.828.577.310	100	100	4	2.828.577.310	40	20,65				
		1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	7	7	7	11.447.804.564	1	436.096.283	2	-63.991.283	2	171.588.800	2	569.681.300	7	1.113.375.100	100	70,96	14	1.113.375.100	200	9,73				
		1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	450	90	90	6.928.044.000	22	129.189.600	22	84.636.400	23	111.864.000	23	486.619.000	90	812.309.000	100	64,08	180	812.309.000	40	11,72				
		1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450	90	90	586.847.564	22	111.100.000	22	-223.616.685	23	19.724.800	23	40.562.300	90	111.077.100	100	99,98	180	111.077.100	40	18,93				
		1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	5	5	3.932.913.000	1	32.500.000	1	74.989.000	1	40.000.000	2	42.500.000	5	189.989.000	100	99,99	10	189.989.000	40	4,83				
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Terbinanya aparatur/ pegawai yang berkualitas/berkompetensi	40	30	30	6.073.645.000	7	87.918.648	7	310.864.463	8	83.331.110	8	128.777.821	30	610.892.042	100	93,39	60	610.892.042	150	10,06				
		1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kepegawaiannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas Beserta Atribut Kepegawaiannya	5	1	1	997.260.000	0,5	198.787.500	0,5	198.787.500	0,5	198.787.500	1	198.787.500	100	99,64	2	198.787.500	40	19,93						
		1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	145	25	30	5.076.385.000	7	87.918.648	7	112.076.963	8	83.331.110	8	128.777.821	30	412.104.542	100	90,64	55	412.104.542	37,93	8,12				
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	12	1.214.444.125	3	449.053.327	3	89.562.297	3	332.850.598	3	297.745.250	12	1.169.211.772	100	96,28	24	1.169.211.772	160	7,81				
		1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	4	4	1.138.491.000	1	124.252.728	1	22.000.000	1	25.973.400	1	33.948.400	1	124.205.300	100	99,96	8	124.205.300	40	10,91				
		1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	1	1	610.285.000	0,25	30.000.670	0,25	0,25	0,25	37.651.600	1	67.652.270	100	125,28	2	67.652.270	40	11,09						
		1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	3	3	5.939.271.000	1	300.858.000	1	74.239.548	1	149.784.129	1	75.944.900	3	299.968.577	100	99,7	6	299.968.577	40	5,05				
		1.03.01.1.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	0	0	0	994.355.000	1	69.285.496	1	24.846.500	1	30.335.000	1	41.938.000	5	166.405.000	100	86,93	5	166.405.000	16,73					
		1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	1	1	3.599.548.000	0,25	218.574.613	0,25	18.220.833	0,25	92.271.069	0,25	74.782.250	1	403.848.765	100	99,97	2	403.848.765	40	11,22				
		1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5</																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)					
					K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp	
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pengadaan peralatan sedang kantor	Unit	40	831.132.000	25		30	102.053.645	7	74.641.155	7	6.000.000	8	12.000.000	8	9.000.000	30	101.641.155	100	99,6	55	101.641.155	137,5	12,23	
		1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0		0	0																	
		1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	154	831.132.000	28		32	102.053.645	74.641.155	16	6.000.000	16	12.000.000	9.000.000	32	101.641.155	100	99,6	60	101.641.155	38,96	12,23			
		01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang berkompoten	Orang	160	30.250.000.000	0		120	3.612.823.577	301.300.777	30	1.270.685.511	35	756.669.738	163.541.649	65	2.492.197.675	54,17	68,98	65	2.492.197.675	40,63	8,24			
		1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang di sertifikasi	Orang	120	16.500.000.000	0		120	2.762.956.520	202.539.288	30	1.077.670.817	35	343.003.330	111.550.000	65	1.734.763.435	54,17	62,79	65	1.734.763.435	54,17	10,51			
		1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Peenyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	orang	0	0	0		0	0																	
		1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	orang	600	10.460.000.000	40		120	2.264.956.520	169.539.288	40	912.325.817	40	94.588.000	62.050.000	80	1.238.503.105	66,67	54,68	120	1.238.503.105	20	11,84			
		1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Lembaga	375	6.040.000.000	40		75	498.000.000	33.000.000	37	165.345.000	38	248.415.330	49.500.000	75	496.260.330	100	99,65	115	496.260.330	30,67	8,22			
		1.03.11.1.01.0014	Facilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Orang	0	0	0		0	0																	
		1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatibannya	Orang	0	0	0		0	0																	
		1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	Lembaga	0	0	0		0	0																	
		1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPAJK) Cakupan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPAJK) Cakupan Daerah Provinsi	Dok/Lap	5	9.800.000.000	0		5	621.738.737	1	67.673.000	1	145.065.648	1	327.957.800	2	38.491.649	5	579.188.097	100	93,16	5	579.188.097	100	5,91	
		1.03.11.1.02.0000	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Diperasikan	Dokumen	0	0	0		0	0																	
		1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Dokumen	13	2.050.000.000	1		1	142.807.441	0,25	6.000.000	0,25	9.999.000	0,25	115.457.000	0,25	9.000.000	1	140.456.000	100	98,35	2	140.456.000	15,38	6,85	
		1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Dokumen	5	2.500.000.000	1		1	144.305.000	0,25	6.000.000	0,25	15.093.000	0,25	112.256.800	0,25	9.000.000	1	142.349.800	100	98,65	2	142.349.800	40	5,69	
		1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPAJK	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPAJK	orang	295	5.250.000.000	60		60	334.626.296	55.673.000	119.973.648	60	100.244.000	20.491.649	60	296.582.297	100	88,57	120	296.582.297	40,68	5,65				
		1.03.11.1.03	Kebijakan khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi																									
		1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi pada Lintas Kab/kota	Dokumen	13	3.950.000.000	2		3	228.128.320	0,25	31.088.489	0,25	47.949.046	0,25	85.708.608	0,25	13.500.000	1	178.246.143	33,33	78,13	3	178.246.143	23,08	4,51	
		1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	persen	0	0	0		0	0																	
		1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	Dokumen	3	0	0		3	0																	
		01.03.12	PROGRAM PENYELNGGARAAN PENATAAN RUANG	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Persent	0	30.617.037.000	0		0	5.025.658.333	502.330.059	1.416.013.274	1.007.299.175	1.289.770.152	4.215.412.660	83,88	4.215.412.660										
				Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Penataan Ruang	Persentase	85		72		70	72	72	72	72	72	102,86	144	169,41										
		1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Penataan Ruang	Persentase	10	3.750.000.000	10,8		10	493.620.600	53.457.300	174.377.190	89.479.354	10	161.985.804	10	479.299.648	100	97,1	20,8	479.299.648	208	12,78				
		1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen	5	1.250.000.000	1		1	169.709.800	0,25	40.917.300	0,25	28.685.700	0,25	23.781.000	0,25	73.032.000	1	166.416.000	100	98,06	2	166.416.000	40	13,31	
		1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	10	2.500.000.000	2		2	323.910.800	0,5	12.540.000	0,5	145.691.450	0,5	65.698.354	0,5	88.953.804	2	312.883.648	100	96,6	4	312.883.648	40	12,52	
		1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase	10	3.000.000.000	10,8		10	477.630.100	199.575.212	109.046.503	10	111.929.658	10	420.551.373	100	86,05	20,8	420.551.373	208	14,02					
		1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Dokumen	5	1.500.000.000	1		1	214.000.000	0,25	0,25	92.802.390	0,25	56.183.054	0,25	63.386.954	1	212.372.398	100	99,24	2	212.372.398	40	14,16		
		1.03.12.1.02.0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RTRR Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1.500.000.000	1		1	263.630.100	0,25	0,25	106.772.822	0,25	52.863.449	0,25	48.542.704	1	208.178.975	100	78,97	2	208.178.975	40	13,88		
		1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase	10	2.550.000.000	10,9		10	999.445.300	27.000.000	224.734.690	329.212.354	10	189.985.804	10	770.932.848	100	77,14	20,9	770.932.848	209	30,23				
		1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	5	1.300.000.000	1		1	713.445.400	0,25	15.000.000	0,25	89.140.200	0,25	253.939.500	0,25	127.070.600	1	485.150.300	100	68	2	485.150.300	40	37,32	
		1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	5	1.250.000.000	1		1	285.999.900	0,25	12.000.000	0,25	135.594.490	0,25	75.272.854	0,25	62.915.204	1	285.782.548	100	99,92	2	285.782.548	40	22,86	
		1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase	10	5.250.000.000	9,6		10	680.727.300	31.451.398	248.594.967	153.387.495	10	218.413.915	10	651.847.775	100	95,76	19,6	651.847.775	196	12,42				
		1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	kasus	5	1.500.000.000	1		1	89.467.500	0,25	11.999.580	0,25	40.621.960	0,25	2.537.000	0,25	6.943.500	1	62.102.040	100	69,41	2	62.102.040	40	4,14	
		1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	5	1.250.000.000	1		1	213.999.900	0,25	4.720.000	0,25	72.909.090	0,25	56.776.654	0,25	79.390.904	1	213.796.648	100	99,91	2	213.796.648	40	17,1	
		1.03.12.1.04.0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Dokumen	5	1.250.000.000	1		1	213.630.000	0,25	0,25	113.291.190	0,25	49.552.964	0,25	50.438.454	1	213.282.608	100	99,84	2	213.282.608	40	17,06		
		1.03.12.1.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfisikal	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	5	1.250.000.000	1		1	163.629.900	0,25	14.731.818	0,25	21.772.727	0,25	44.520.877	0,25	81.641.057	1	162.666.479	100	99,41	2	162.666.479	40	13,01	
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	16.067.037.000	3		3	2.374.235.033	0,5	390.421.361	0,5	568.731.215	1	326.173.469	1	607.454.971	1	1.892.781.016	33,33	79,72	4	1.892.781.016	133,33	11,78	
		1.03.01.1.01.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	4.129.640.000	3		3	773.431.143	0,75	132.856.489	0,75	126.875.041	0,75	83.067.580	0,75	256.898.436	3	599.697.546	100	77,54	6	599.697.546	200	14,52	

